

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN TEORI EKONOMI POLITIK

**Emasasmita**

emasasmita12@gmail.com

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Ayudia Sokarina**

ayudia.sokarina@unram.ac.id

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Yusli Mariadi**

yuslimariadi@unram.ac.id

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Tangga Mandiri” Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur berdasarkan teori ekonomi politik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada tiga informan kunci dan dokumentasi bersumber dari laporan keuangan BUMDes periode 2019 dan 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik. Adapun Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dalam mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat telah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa. Namun disisi lain, dalam hal pertanggungjawaban usaha BUMDes melalui laporan keuangan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena masih menggunakan pembukuan sederhana. Hal ini dikarenakan tidak adanya peran Pemerintahan Desa dalam mengatur kebijakan pelaporan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang akan diambil Pemerintah Desa pada periode yang akan datang kurang relevan, karena laporan keuangan BUMDes tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

**Kata Kunci: Laporan Keuangan, Ekonomi Politik, Kebijakan, Pemerintah Desa**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial statements of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) “Tangga Mandiri”, Ketangga Jeraeng Village, East Lombok Regency based on Political Economy Theory. This type of research uses qualitative research. Data was collected through interviews and documentation. Interviews were conducted with three key informants and documentation sourced from the 2019 and 2020 BUMDes financial statements. The data analysis technique in this study used political economy theory. The results of this study indicate that the Village Government in narrowing the economic gap in the community has formed a Village Owned Enterprise. But on the other hand, in terms of BUMDes business accountability through financial reports from 2019 to 2020 it has not been in accordance with applicable accounting standards because it still uses simple bookkeeping. This is because there is no role for the Village Government in regulating BUMDes financial reporting policies. Therefore, the development policy that will be taken by the Village Government in the future period is less relevant because the BUMDes financial report does not show the actual situation.*

*Keyword: Financial Statement, Political Economy, Policy, Village Government*

### PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur perkotaan maupun pedesaan. Dalam hal ini institusi pemerintah mengeluarkan kebijakan

untuk memberikan kemudahan bagi desa untuk memperoleh pendapatan asli desa, salah satunya adalah “Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah” yang mengatakan bahwa “Setiap pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa”. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi ekonomi yang digunakan sebagai instrumen pemanfaatan ekonomi dengan bermacam potensi sumber daya. Pemanfaatan potensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha/bisnis mereka.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan perubahan Badan Usaha Milik Desa pada BAB III pasal 12 ayat 3” menyatakan bahwa “pelaksana operasional (direktur) berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan”. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah instansi besar maupun kecil yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan instansi/perusahaan tersebut. Akuntansi pada mulanya merupakan sarana komunikasi interen sebuah industri yang kemudian berkembang menjadi sarana komunikasi antar industri. Sarana komunikasi dalam akuntansi yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun berdasarkan hasil penelitian masih banyak institusi khususnya institusi non pemerintah menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Pradhana, 2020).

Mardiyah (2002) menyatakan bahwa standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk melebihi pendapatan dan menurunkan biaya walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Hal ini dipertegas lagi dengan pernyataan Nordiawan dkk (2012) dalam Halizah (2018) diperlukan adanya pertimbangan identitas dalam mengenali lingkungan pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan salah satunya adalah berlangsungnya proses politik. Jadi, dalam organisasi pemerintah keberlangsungan proses politik dalam berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, politik memegang peran yang amat signifikan terutama dalam menentukan arah dan kebijakan yang diambil oleh sektor publik.

Sementara itu, Gerboth dalam Rahman (2018) standar akuntansi muncul karena adanya proses politik untuk memecahkan masalah ekonomi melalui pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, politik dapat dikatakan sebagai wajah lain dari ekonomi. Kepentingan politik adalah gambaran dari kepentingan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa Akuntansi tidak dapat dilepaskan oleh ekonomi, sehingga akuntansi sangat berkaitan erat dengan ekonomi politik diantaranya pemilihan sistem, standar, dan metode akuntansi.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pradhana (2020) menunjukkan bahwa penyajian dan pelaporan keuangan BUMdes Bontonampo Jaya di Desa Bontonampo Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono belum sesuai dengan SAK ETAP. Penelitian serupa dilakukan oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa BUMDes Usaha Mandiri desa Talang sari belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Selanjutnya penelitian tentang ekonomi politik dilakukan oleh Sokarina (2011b) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan Political Economy of Accounting tidak hanya merepresentasikan kepemilikan pemegang saham, akan tetapi juga merepresentasikan kepemilikan stakeholders yang terdiri dari karyawan, pemerintah, kreditor dan masyarakat.

Pemerintah memahami privatisasi menjadi alat untuk mencapai rente ekonomi, privatisasi telah gagal melakukan distribusi kepemilikan, dan bersamaan dengan itu terjadi proses eksploitasi konsumen berupa tarif yang lebih tinggi untuk peningkatan intensif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Aminah, 2017) tentang ekonomi politik antara perusahaan dengan para petani menunjukkan bahwa relasi sosial yang terjalin antara petani sawit dengan PT.Surya Lestari II awalnya saling mendukung, petani memberikan tanah mereka kepada perusahaan sedangkan perusahaan harus memberikan modal kepada petani. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik memiliki hubungan dengan pengambilan kebijakan. Ekonomi politik muncul untuk mengkaji bagaimana persoalan ekonomi dipecahkan dengan menempatkan politik sebagai pendukung. Oleh karena itu, hasil dari proses politik untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang relevan.

Di Indonesia, penelitian tentang analisis laporan keuangan BUMDes lumayan banyak, namun kebanyakan penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada penilaian kinerja BUMDes itu sendiri. Dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes belum mencatat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan kondisi ini, tentu kualitas laporan keuangan BUMDes tersebut berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Desa yang notabene nya merupakan pemilik usaha BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan BUMDes berdasarkan teori ekonomi politik.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Ekonomi Politik**

#### **Pengertian Ekonomi Politik**

Ekonomi politik merupakan manajemen terhadap perekonomian dalam lembaga public yang meliputi tatanan negara maupun institusi yang lebih kecil. Rachbini (2002) berpendapat bahwa ekonomi politik merupakan studi keilmuan yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Dalam pemaknaan politik sebagai kekuasaan, hubungan antara ekonomi dan politik bisa diartikan ke dalam isu tentang hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Kekuasaan merupakan upaya menghasilkan sebuah hasil tertentu secara paksa. Jadi meskipun kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, bentuk aslinya adalah kemampuan dalam memberikan paksaan (Deliarnove, 2006:8) Singkatnya, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik memiliki perbedaan yaitu alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berbeda. Oleh karena itu ekonomi politik merupakan gabungan antara dua bidang ilmu yaitu ekonomi dan politik, dengan kata lain menggabungkan dua fokus yang berbeda. Namun, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu yang terjadi dalam masyarakat yaitu mengorganisasi dan mengordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Oleh karena itu, asumsi yang digunakan dalam ilmu politik adalah upaya pembuatan kebijakan public secara bersama bukan individu. Terkait dengan hal ini

(Yustika, 2009) berpendapat bahwa penerapan dari kebijakan ekonomi politik selalu memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Penggabungan kedua bidang tersebut dapat secara jelas memberikan gambaran bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi yang ada.

### **Akuntansi**

Akuntansi biasa disebut sebagai bahasa penyampaian bisnis, hal ini dikarenakan dunia bisnis biasa melakukan kegiatan akuntansi yang berbentuk pencatatan dan menginterpretasikan transaksi ekonomi baik untuk organisasi pemerintahan, perusahaan, perseroan dan lembaga-lembaga lainnya (Santi, 2019). Sedangkan menurut *American Accounting Association* (AAA) 1966, akuntansi diartikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan komunikasi dari sebuah informasi ekonomi yang dimungkinkan dapat dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi (Marlia, 2019). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah ilmu yang mempelajari pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang kemudian menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembuat keputusan.

### **Laporan Keuangan**

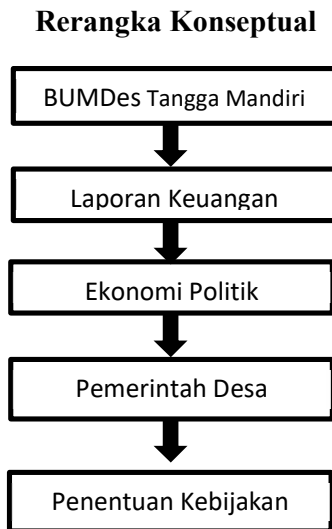
Pengertian laporan keuangan

Menurut Wahyu (2018:2) laporan keuangan adalah sebuah informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dalam aspek keuangan. Laporan yang harus disusun oleh manager kepada atasan perusahaan atas kegiatan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak pemegang kepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemerintah, pemilik perusahaan, kreditur, maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

### **BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa)**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Tujuan utama pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengoptimalan asset agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa. BUMdes juga berperan dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa. Disamping itu, dengan adanya BUMdes maka dapat membantu dalam peningkatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.



**Gambar 1.1 Rerangka Konseptual**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu BUMDes yang terletak di Lombok Timur tepatnya di BUMDes “Tangga Mandiri” Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) informan, yaitu ketua BUMDes, koordinator unit, dan Kepala Desa sebagai komisaris sekaligus pengguna laporan keuangan untuk mengambil kebijakan. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan BUMDes periode 2019 dan 2020. Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada pihak desa dan direktur BUMDes. Setelah memperoleh informasi, maka peneliti mengumpulkan bukti berupa foto serta dari jurnal dan artikel sebagai acuan dalam dalam menyusun kajian pustaka tentang laporan keuangan BUMDes maupun ekonomi politik. Selanjutnya merangkum data-data yang sudah diperoleh dari kegiatan dokumentasi dan wawancara. Kemudian dibuat rangkuman secara sederhana untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data berupa uraian singkat mengenai objek penelitian kemudian dibuat narasi sesuai dengan hasil dokumentasi dan wawancara. Kemudian data yang disajikan dari hasil dokumentasi dan wawancara akan digunakan sebagai penilaian terhadap laporan keuangan BUMDes serta menyesuaikan isu ekonomi politik dengan pembentukan BUMDes. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil gabungan dari proses pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara yang dalam hal ini peneliti berusaha menemukan jawaban dari masalah penelitian tentang ekonomi politik dalam pelaporan keuangan BUMDes.

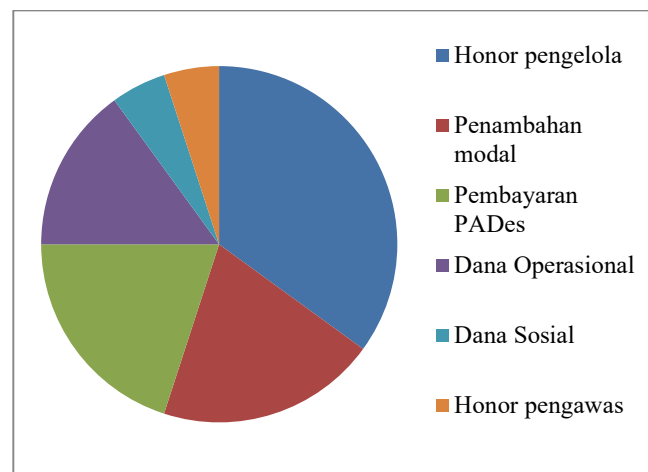
#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi Politik dalam pelaporan Keuangan BUMDes desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

**Konsep ekonomi politik dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).**

Konsep utama dalam analisis ekonomi politik merupakan suatu kebijakan pemerintahan desa yang melibatkan para pelaku kebijakan dimana kebijakan ini untuk mempersempit kesenjangan ekonomi masyarakat Desa Ketangga Jeraeng dengan membentuk sebuah badan usaha yang dinamakan BUMDes “Tangga Mandiri”. Hal ini menggambarkan teori Ekonomi Politik yang diungkapkan oleh Deliarnove (2006) yang menyatakan bahwa peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur jalannya perekonomian yang ada di masyarakat yaitu masyarakat Ketangga Jeraeng karena pada dasarnya inisiasi awal pembentukan BUMDes ini karena Pemerintah Desa ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dengan menjalankan usaha pinjaman kredit dengan bunga yang lebih rendah agar terhindar dari rentenir-rentenir yang memberatkan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas, langkah untuk membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa sangat tepat karena pada dasarnya Teori Ekonomi Politik menyangkut kepada sebuah keputusan yang yang diambil untuk kepentingan publik dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan institusi ekonomi dan politik yang ada. Kebijakan publik dalam hal ini dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes diawali dengan penyertaan modal yang bersumber dari Penyertaan modal desa pada Agustus 2018 berjumlah Rp 80.000.000 dan pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000 dari anggaran Dana Desa. Mekanisme penyaluran dana pinjaman yang dijalankan BUMDes ini adalah dana penyertaan modal dari desa dan kemudian diserahkan kepada Direktur BUMDes dan kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai nasabah dengan menyerahkan syarat fotocopy KK dan KTP. Dana yang disalurkan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat sejumlah 10,000,000 (maksimal) dengan bunga 15% dalam jangka waktu pelunasan 10 bulan sehingga terhitung jumlah bunga yang dibayarkan 1,5% perbulan dan uang administrasi sesuai dengan jumlah pinjaman. Adapun hasil usaha yang digambarkan melalui laporan keuangan BUMDes ini dibayarkan setiap bulannya. Namun untuk periode pelaporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan yaitu per tahun. Adapun hasil usaha ini disalurkan ke beberapa elemen diantaranya:



**Gambar 1.2 Alokasi hasil usaha**

Pada dasarnya fungsi BUMDes yang bukan hanya berperan sebagai lembaga komersial tetapi juga lembaga sosial, sehingga alokasi hasil usaha BUMDes di salurkan selain untuk kegiatan komersialnya, BUMDes juga memberikan alokasi hasil usaha sebesar 20% ke PADes yang merupakan salah satu tujuan pembentukan BUMDes yaitu dapat memberikan peningkatan PADes, selanjutnya untuk kegiatan sosial sebesar 5%, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BUMDes terhadap masyarakat sekitar. Hasil alokasi usaha BUMDes sudah menunjukkan adanya transparansi untuk bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi keuangan BUMDes.

Oleh karena itu, isu ekonomi politik yang terjadi dalam masyarakat yaitu mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes dijalankan untuk memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit yang kemudian hasil usaha dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan yang tujuan akhirnya adalah untuk menggambarkan alokasi beban dan keuntungan usaha BUMDes.

#### **Laporan keuangan BUMDes Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.**

Hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diuraikan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan oleh pihak BUMDes “Tangga Mandiri” masih menggunakan pembukuan sederhana dalam mencatat pengeluaran serta pemasukan yang bisa dilihat pada pembukuan kas. Pengalokasian hasil usaha pada tahun 2019 tidak bisa dicantumkan karena tidak ada dokumen seperti neraca maupun laporan laba rugi. Namun informan mengatakan bahwa pada tahun 2019 pernah melakukan kesalahan dalam memberikan PADes yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan modal dikeluarkan untuk pembayaran kelebihan PADes pada tahun 2020 yang dapat dilihat di neraca tahun 2020. Besaran PADes yang dibayarkan sebesar 20% yang dapat diterima pada akhir periode laporan keuangan. Adapun bentuk laporan keuangan yang disajikan pada tahun 2020 yaitu:

#### **NERACA RUGI/LABA BUMDES “TANGGA MANDIRI: TAHUN BUKU:2020**

A.	Piutang pokok pinjaman tahun 2019		126,424,500
	Saldo per 31 desember 2019		966,000
	Tambahan modal dari jasa pinjaman tahun 2019		<u>5,879,000</u>
	Jumlah modal tahun 2020		133,329,000
B.	Uang jasa pinjaman januari s.d Desember 2020		28,567,000
	Uang jasa administrasi pinjaman jan s.d des		4,381,500
C.	Pembagian jasa januari s.d desember 2020		
1.	Penambahan modal usaha	20%	6,589,700
2.	Pembayaran PADes	20%	6,589,700
3.	Dana sosial	5%	1,647,425
4.	Honor pengelola	35%	11,531,975
5.	Honor pengawas	5%	1,647,425
6.	Dana operasional	15%	<u>4,925,275</u>
	Jumlah		32,948,500

D. Modal per 31 Desember 2020	
1. Piutang pokok pinjaman 2020	133,715,000
2. Saldo per 31 Desember 2020	4,585,300
3. Tambahan modal jasa pinjaman 2020	<u>6,589,700</u>
Jumlah	144,890,500
E. Penyusutan modal tahun 2020	
1. Kelebihan bayar PADes	3,410,000
2. Temuan insfektorat	1,500,000
3. Pembiayaan covid 19	1,700,000
4. Pelunasan hutang adhar	<u>800,000</u>
Jumlah	7,410,000
Total modal per 31 Desember 2020	137,480,500

Dari gambaran diatas, laporan keuangan yang disusun masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain tidak adanya kesesuaian pelaporan neraca dan akun yang dicantumkan. Laporan keuangan yang dibuat juga tidak lengkap karena tidak mencantumkan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dijadikan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Direktur BUMDes kepada pemerintahan desa untuk melaporkan hasil usaha yang dijalankan selama 1 periode. Hasil laporan inilah yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membuat kebijakan untuk periode berikutnya. Namun, apabila laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar, maka hal ini akan menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa kurang relevan.

Selanjutnya pembagian hasil usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada tahun 2019 belum diungkapkan sehingga menyulitkan peneliti untuk menampilkan data. Sejatinya pembagian usaha sebagai wujud dari distribusi laba merupakan poin penting dalam kajian ekonomi politik khususnya *Political Economy Of Accounting* (Sokarina, 2011a). Namun pada tahun 2020 pembagian hasil usaha BUMDes sudah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan, ada kemajuan dalam memberikan laporan keuangan meskipun belum sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **Peran Pemerintahan Desa Dalam Laporan Keuangan BUMDes “Tangga Mandiri” Kecamatan Keruak**

Penyusunan laporan keuangan BUMDes menunjukkan tidak adanya campur tangan pemerintah desa sehingga tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh Direktur BUMDes yang bukan dilatarbelakangi oleh pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Hal ini tentu memberikan dampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat sehingga tidak memberikan gambaran BUMDes yang sebenarnya.

Laporan keuangan BUMDes disusun oleh Direktur BUMDes. Pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan keuangan BUMDes melibatkan staf koordinator unit. Serta masih kurangnya kapasitas administrasi dan tata kelola BUMDes mengharuskan laporan keuangan BUMDes disusun secara sederhana, agar memudahkan staff BUMDes didalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Adanya dukungan dan keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes, tentunya proses pelaporan keuangan semaik membaik. Namun dalam faktanya pemerintah desa memberikan tanggung jawab penuh kepada BUMDes untuk membuat laporan keuangan.



Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pelaporan keuangan seperti yang diungkapkan oleh Direktur BUMDes “Tangga Mandiri”:

“Untuk laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan 2020 menurut saya masih belum karena belum ada SDM yang memadai. Kan dari kita tidak ada yang ahli dalam akuntansi. Makanya saya ikutin pembukuan koperasi, meskipun hanya secara sederhana untuk laporan ke desa”(Ruba’i, wawancara 29 september 2021)

Selanjutnya, hal serupa dikemukakan oleh karyawan coordinator unit yang mengungkapkan bahwa :

“Untuk laporan keuangan masih belum sesuai karena pada saat saya mencoba untuk menyusun sesuai standar, saya menjadi bingung untuk menempatkan akun-akun yang ada. Dan karena masih kuliah, jadi waktu untuk mencoba membuat laporan belum ada”. (Isfi, wawancara 29 september 2021)

Selain kurangnya pengetahuan SDM, yang menyebabkan laporan keuangan yang tidak sesuai juga karena tidak adanya peran pemerintah desa maupun pusat dalam mengatur standar pelaporan keuangan BUMDes dan tidak ada pelatihan yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur BUMDes:

“Desa dalam hal pelaporan keuangan tidak pernah ikut campur, karena semuanya hanya diserahkan ke BUMDes. Desa hanya menerima hasil usaha BUMDes dalam bentuk pembayaran PADes. Dan pemerintah pusat yang di Selong tidak pernah menuntut untuk harus menyusun sesuai standar. Mereka hanya menanyakan bagaimana jalannya BUMDes dan pembagian hasil usaha ”( Ruba’i wawancara 29 september 2021)

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Desa Ketangga Jeraeng yang mengungkapkan bahwa:

“Desa hanya memberikan pengawasan dalam aktivitas BUMDes dan tidak pernah memikirkan laporan keuangan. Kita hanya fokus pada penyertaan PADes yang digunakan untuk pembangunan seperti membuat selokan, bisa juga untuk keperluan desa yaitu misalnya membeli kursi meja dll.”(Zaini, wawancara 30 september 2021)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan teori ekonomi politik, kebijakan pemerintahan desa dengan mendirikan BUMDes merupakan langkah yang sangat tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat agar terhindar dari pinjaman-pinjaman yang memberikan bunga yang lebih tinggi. Dalam hal ini pemerintahan desa berperan sebagai penyedia jasa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adanya BUMDes juga turut memberikan sumbangan terhadap peningkatan PADes sebesar 20% yang dapat diketahui dari hasil usaha BUMDes yang digambarkan melalui laporan keuangan per periodenya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga tidak bisa menggambarkan kondisi BUMDes yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran pemerintahan desa dalam pelaporan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, isu ekonomi politik yang menggambarkan pengalokasian beban dan keuntungan kurang relevan dengan kondisi BUMDes karena pencatatan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

### **Keterbatasan dan Saran**

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan penelitian berikut ini: (1) periode yang diamati terlalu singkat yaitu 2 tahun periode (2019-2020). (2) penelitian yang dilakukan

hanya pada BUMDes yang menjalankan kegiatan pinjaman kredit sehingga tidak bisa melihat pelaporan keuangan yang menjalankan beberapa jenis usaha. (3) penelitian ini memasukkan periode pengamatan 2019 yang dimana, BUMDes belum melakukan pencatatan alokasi usaha, sehingga tidak bisa mengungkapkan pembagian PADes pada tahun bersangkutan. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dikemukakan maka saran penelitian yang akan datang yaitu (1) penelitian selanjutnya agar mencari BUMDes yang berjalan lumayan lama dengan jenis usaha yang bermacam-macam sehingga bisa mengetahui kemajuan dari tahun ke tahun serta BUMDes yang selalu melaporkan hasil alokasi usaha tiap tahunnya.

## REFERENSI

- Aminah, S. (2017). *Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan Petani dengan PT Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah*. Uin Alauddin Makassar.
- Deliarнове. (2006). *Ekonomi politik*. Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=E8sPDpge5I0C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 6 juli 2021
- Mardiyah, A. A. (2002). Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 96–123. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/809/933>
- Marlia, I. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Uin Raden Intan Lampung.
- Pradhana, R. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bontonombo Jaya Di Desa Bontonombo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* [Universitas Negeri Makassar]. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/17696>
- Rachbini, J. (2002). *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Ghalia Indonesia.
- Rahman, S. (2018). *Praktik Political Willingness Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Sektor Publik (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu)* [Universitas islam negeri alauddin makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11289/>
- Santi, N. (2019). *Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren*. Uin Raden Intan Lampung.
- Sari, T. N. (2020). *Analisis proses penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP BUMdes Usaha Mandiri Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sokarina, A. (2011a). *Analisis Kritis Kinerja Pra dan Pascaprivatisasi dari Perspektif Political Economy of Accounting (Studi pada PT Telkom Tbk dan PT Indosat Tbk)*. Universitas Brawijaya.
- Sokarina, A. (2011b). Menggagas Dimensi Kinerja Perusahaan Berdasarkan Perspektif Political Economy Of Accounting (PEA). In *Simposium Nasional akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Wahyu Hidayat, W. (2018). *Analisa Laporan Keuangan* (F. Fabri (ed.); 1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik;Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Belajar.